

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Dinas Arsip dan Perpustakaan

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

2025

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat diselesaikan. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dengan baik. Shalawat beriringkan salam tak lupa kami ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Penyusunan LKJIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang mulai dari Unit/ Instansi yang ada dalam Pemerintahan itu sendiri.

Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggungjawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu segala kritik serta saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pariaman, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Padang Pariaman



Dra.SUMARNI,M.Pd
NIP. 19681023 199303 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL.....	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	6
C. Sistematika Pelaporan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis (RPJMD 2021-2026).....	11
B. Rencana Strategis (RPJMD 2025-2029).....	14
C. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja.....	19
B. Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Langkah ke Depan	61
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Komposisi PNS Berdasarkan Golongan	5
Tabel Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan.....	5
Tabel Permasalahan Utama (Strategic Issue)	6
Tabel Tujuan dan Sasaran Strategis (RPJMD 2021-2026).....	12
Tabel Rencana Kinerja Tahun 2025 (RPJMD 2021-2026).....	13
Tabel Tujuan dan Sasaran Strategis (RPJMD 2025-2029).....	15
Tabel Rencana Kinerja Tahun 2025 (RPJMD 2025-2029).....	16
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (RPJMD 2021-2026).....	17
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (RPJMD 2025-2029).....	18
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2021 s/d 2026.....	20
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2026 s/d 2029.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan Pemerintah yang berkinerja maka disusunlah berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi secara akuntabilitas merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau perencanaan jangka menengah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

A. GAMBARAN UMUM DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Pembangunan daerah terutama dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa otonomi diletakkan pada Daerah Kabupaten/ Kota. Dalam Undang-undang tersebut juga diberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah diarahkan agar Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi dan terciptanya hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah. Untuk itu dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terlihat adanya peningkatan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dengan memperhatikan kehendak, keinginan serta aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan tuntutan reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang tertuang dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas KKN. Selanjutnya dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 1999 dan UU No. 31 Tahun 1999.

Untuk mendorong kemampuan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menciptakan pemerintah yang akuntabel, bertanggung jawab dengan ukuran dan indikator kinerja yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah telah menyusun Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Tahun 2021–2026. Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tersebut merupakan pedoman atau penunjuk arah bagi seluruh unit kerja, dinas dan perangkat Pemerintah Daerah serta seluruh unsur masyarakat dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman dan dasar dari pembuatan laporan akuntabilitas kinerja SKPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib bukan pelayanan dasar. Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu Pemerintahan Daerah di Indonesia telah melaksanakan Urusan Wajib Bidang Perpustakaan dan Kearsipan ini sejak Tahun 2009. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan salah satu SKPD di Lingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang

Pariaman No. 10 Tahun 2016 Tanggal tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2016 tentang rincian uraian tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok :

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearsipan dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Padang Pariaman dibidang perpustakaan dan kearsipan dalam rangka pelaksanaan tugas dasar untuk dapat terealisasi dalam kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Serta fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun Kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan dengan kewenangan yang dimilikinya.
2. Memberikan Izin dan Pelaksanaan pelayanan dibidang perpustakaan dan kearsipan.
3. Memberikan Bimbingan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan
4. Melakukan penyuluhan tentang perpustakaan dan kearsipan yang erat kaitannya dalam upaya pengembangan perpustakaan dan kearsipan yang optimal.
5. Melakukan tata usaha kantor

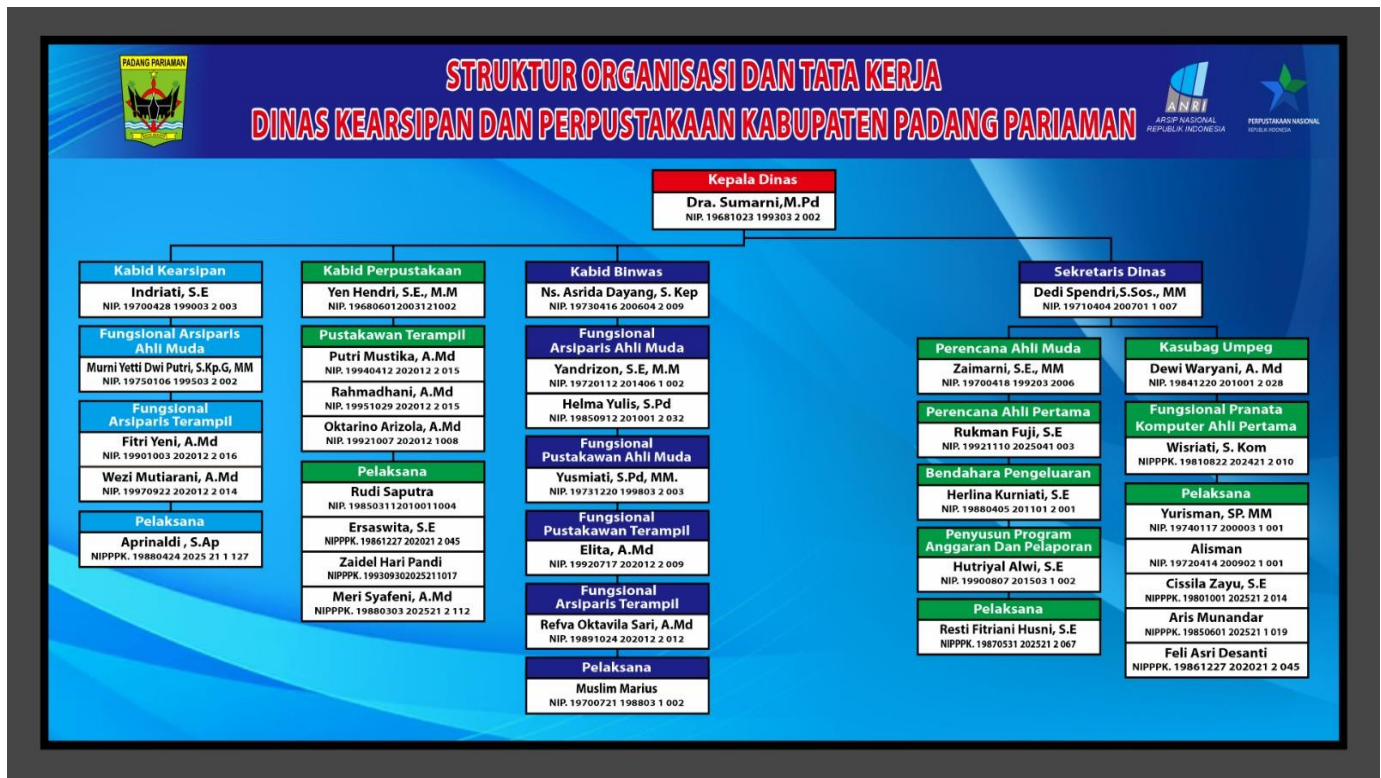
Dalam struktur organisasi yang ada, pelaksanaan tugas pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dilakukan oleh seksi-seksi yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 yaitu :

Kepala Dinas, mempunyai tugas :

1. Memimpin dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan kearsipan merumuskan kebijakan penyelenggaraan kearsipan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Membina penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan daerah pada Perangkat Daerah, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik, lembaga pendidikan, kecamatan, dan desa/ kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dan masyarakat;

4. Melakukan pengawasan kearsipan dan Perpustakaan daerah pada Perangkat Daerah, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik, lembaga pendidikan, kecamatan, dan desa/ kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
5. Menyelenggarakan pengelolaan arsip dinamis;
6. Menyelenggarakan pengelolaan arsip statis;
7. Menyelenggarakan pelayanan, dan pemanfaatan arsip;
8. Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan ;
9. Menyelenggarakan pelayanan dan pemanfaatan perpustakaan;
10. Menyelenggarakan perencanaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, serta umum.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI



1.2 SUMBER DAYA MANUSIA

1.2.1 NAMA PEJABAT BERDASARKAN STRUKTUR ORGANISASI

Jumlah Pegawai yang ada pada SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 31 Desember 2025 adalah 32 orang, yang terdiri dari 24

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

orang Pegawai Negeri Sipil, 8 orang tenaga PPPK dan 1 orang tenaga Non ASN (Kebersihan Kantor). Dimana Gol. II 9 orang, Gol. III 9 orang dan Gol. IV 6 orang, dengan kualifikasi pendidikan S2 4 orang, sarjana 9 orang dan 8 orang sarjana muda dan SMA 3 orang.

Ditinjau dari golongannya, komposisi PNS dilingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman adalah :

KOMPOSISI PNS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. PADANG PARIAMAN BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2025

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	6
2	GOLONGAN III	9
3	GOLONGAN II	9
	J U M L A H	24

Sumber : DUK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025

KOMPOSISI PNS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. PADANG PARIAMAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH MENURUT KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Strata 2	2	2	4
2	Strata 1	3	6	9
3	D.IV	-	-	-
4	D.III	1	7	8
5	SLTA	3	-	3
6	J U M L A H	9	16	24

Sumber : DUK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025

1.2.2 JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 24 personil dengan tingkat pendidikan :

S2 : 4 Orang

S1 : 9 Orang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DIII : 8 Orang

DII : - Orang

SMA : 3 Orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan Pangkat dan Golongan sebagai berikut :

Golongan IV : 6 Orang

Golongan III : 9 Orang

Golongan II : 9 Orang

Golongan I : 0

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

1. Permasalahan Urusan Kearsipan

NO	PERMASALAHAN	DATA PENDUKUNG	PENYEBAB
1	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kearsipan seperti belum adanya depo arsip yang sesuai dengan standar tata kelola kearsipan yang baku serta belum memiliki kendaraan operasional khusus untuk pengelolaan dan penataan arsip ke SKPD, Kecamatan dan Nagari	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan beralamatkan di Jln. A. Yani No 21 Pariaman Tengah Ex. Dinas Pendidikan	Belum adanya Depo Arsip yang memadai dan kendaraan operasional kearsipan
2	Kurangnya Tenaga Fungsional Arsiparis baik di LKPD maupun di OPD dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	ANJAB ABK untuk Jabatan Fungsional Arsiparis	Belum terpenuhinya kebutuhan ASN berdasarkan ANJAB ABK yang telah disusun
3	Belum Seimbangnya antara volume arsip di Kab. Padang	Masing-masing SKPD dan LKD	Jumlah Arsip yang harus di kelola, di

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	Pariaman dengan sarana penyimpanan kearsipan di LKD maupun SKPD.		tata dan di simpan tidak sebanding dengan sarana penyimpanan yang ada pada setiap SKPD maupun LKD.
4	Kurang seriusnya perhatian pimpinan SKPD, Kecamatan dan Nagari terhadap pendataan, penataan arsip serta masih sedikitnya penyerahan arsip statis ke LKD.	Adanya peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengelolaan kearsipan	Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kearsipan belum disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda)
5	Masih rendahnya pengetahuan tenaga fungsional arsiparis di LKD dan tenaga pengelola kearsipan di OPD.	Fungsional Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan ada tapi masih minim pendidikan dan pelatihan	Kurangnya dana APBD untuk pendidikan dan Pelatihan SDM kearsipan
6	Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan kearsipan	Tahun 2025 anggaran untuk Urusan Kearsipan hanya Rp44.278.850,-	Adanya kebijakan DAU peruntukkan yang menyebabkan urusan Kearsipan tidak lagi menjadi mendapatkan porsi anggaran yang ideal

2. Permasalahan Urusan Perpustakaan

NO	PERMASALAHAN	DATA PENDUKUNG	PENYEBAB
1	Masih rendahnya kepedulian stakeholder terhadap pengelolaan perpustakaan di wilayahnya baik itu Perpustakaan Sekolah, Nagari,	Masih banyak perpustakaan Nagari, sekolah dan taman baca masyarakat yang belum memenuhi standar	Keterbatasan anggaran dan kepedulian stakeholder terkait

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	TBM dan Perguruan Tinggi	Nasional Perpustakaan	
2	Belum optimalnya penyelenggaraan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah dan pusat keramaian.	2 unit mobil Perpustakaan Keliling	Luasnya jangkauan wilayah Kabupaten Padang Pariaman dengan keterbatasan personil yang ada pada Perpustakaan Daerah menyebabkan pelaksanaan operasional perpustakaan keliling belum menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Padang Pariaman
3	Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia tenaga Pustakawan dan pengelola perpustakaan	Kualitas layanan perpustakaan kepada pemustaka belum sesuai dengan standar pelayanan maksimal	Belum adanya reward dan punishment kepada tenaga Pustakawan dan Pengelolaan Perpustakaan
4	Belum optimalnya pembinaan perpustakaan ke Nagari, Sekolah dan Taman Baca Masyarakat.	Belum adanya pemerataan layanan perpustakaan di Kabupaten Padang Pariaman	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan gambaran umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman serta menguraikan permasalahan utama (*Strategic Issued*) dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Menyajikan capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 – 2026 melalui Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun 2025 merupakan tahun Kelima periode Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2021-2026.

Untuk mencapai kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyusun Perencanaan Kinerja tahun 2025 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025. Target-target kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman yaitu: ***“Padang Pariaman Berjaya.***

2. Misi

Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada Misi 4 dan Misi 5 Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Misi 4 yang akan diwujudkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.** Misi ini mempunyai tujuan membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Misi 5 yang akan diwujudkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.** Misi ini mempunyai tujuan terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mengacu pada RPJMD 2021 s.d 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Listerasi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan
				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan	Meningkatnya pengelolaan Kearsipan sesuai standar kearsipan	Indeks Kearsipan (ANRI)
	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi KEMENPAN RB	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Hasil penilaian SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021 s.d 2025

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, maka ditetapkan Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 termasuk untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan didukung oleh 3 Sasaran Strategis dengan 4 indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025

Tabel 2.2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan	100
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	70
2	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standart Kearsipan	Indeks Kearsipan (ANRI)	75
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat	78 (BB)

Sehubungan dengan telah dilantiknya Kepala Daerah yang baru dan telah diterbitkannya RPJMD yang baru tahun 2025 s.d 2029 maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga telah menyusun Renstra Tahun 2025 s.d 2029.

Untuk mencapai kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyusun Perencanaan Kinerja tahun 2025 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025 s.d 2029 dan telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025 s.d 2029

B. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman yaitu: ***"Padang Pariaman Maju dan Sejahtera.***

2. Misi

Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada Misi 1 dan Misi 2 Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Misi 1 yang akan diwujudkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Berintegritas.** Misi ini mempunyai tujuan terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.

Misi 2 yang akan diwujudkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah **Menciptakan SDM Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.** Misi ini mempunyai tujuan membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan kesehatan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mengacu pada RPJMD 2025 s.d 2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas dan Berintegrasi	Meningkatnya tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah		
			Meningkatnya Kualitas SDM	Persentase pustakawan dan arsiparis yang bersertifikat
			Meningkatnya Layanan Kearsipan	Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah		
			Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
Menciptakan SDM Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		
			Meningkatnya layanan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025 s.d 2029

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, maka ditetapkan Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 termasuk untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan didukung oleh 3 Sasaran Strategis dengan 4 indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025

Tabel 2.2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatnya Layanan Kearsipan	Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital	20
2	Meningkatnya Kualitas SDM	Persentase pustakawan dan arsiparis yang bersertifikat	15
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	78
4	Meningkatnya kualitas layanan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	59

C. Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

Berikut adalah perjanjian kinerja tahun 2025 berdasarkan kerangka RPJMD tahun 2021 - 2026 :

Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan	100
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	67,50
2	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan sesuai Standart Kearsipan	Indeks Kearsipan (ANRI)	75 (BB)
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat	78 (BB)

Adapun sebagai bentuk akselerasi terhadap visi pembangunan periode baru, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berpedoman pada sasaran strategis dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2025 – 2029**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	78
2	Meningkatnya Kualitas SDM	Persentase Perpustakaan dan Arsiparis yang Bersertifikat	15 %
3	Meningkatnya Layanan Kearsipan	Persentase Dokumen Arsip dalam Bentuk Digital	20 %
4	Meningkatnya Layanan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegeraman Membaca	70

Pada Perjanjian Kinerja Awal dan Perubahan dapat menggambarkan bahwa Sasaran Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengacu kepada Peningkatan Kualitas Layanan Kearsipan dan Perpustakaan serta akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD. Hal tersebut mendukung Visi dan Misi Bupati pada Misi ke 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas dan Misi ke 2 Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen perjanjian kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama Tahun 2025. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat/Kategori
>100	Sangat Berhasil
90 < s.d ≤100	Berhasil
80 < s.d ≤90	Cukup Berhasil
70 < s.d ≤80	Kurang Berhasil
≤70	Tidak Berhasil

A. Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Target dan Capaian kinerja sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 s/d 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026		
			Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
01	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan	90,20	91,93	101,92	90,25	97,27	107,78	90,30	100	110,74	100	97,8	97,8	100	97,5	97,5	100		
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	15	10	66,66	30	28	93,33	35	66,88	191,08	67,50	69,59	103,09	70	56,74	81,06	72		
02	Meningkatnya pengelolaan kearsipan sesuai standar kearsipan	Indeks Kearsipan (ANRI)	73,48	67,76	92,22	60,80	60,01	98,70	63,95	67,05	104,85	68	70,11	103,10	75	66,06	88,08	78		
03	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat	B	AA	128,57	B	A	117,14	B	BB	113,27	76 (BB)	75,50 (BB)	99,34	78 (BB)	79,20 (BB)	101,54	80 (A)		

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 s/d 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029			Tahun 2030		
			Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Real isasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
01	Meningkatnya Layanan Kearsipan	Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital	20	20	100	23			25			30			35			35		
02	Meningkatnya Kualitas SDM	Persentase pustakawan dan arsiparis yang bersertifikat	15	15	100	20			20			25			25			25		
03	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	78	79,20	101,54	79,5			80			80,5			81			81		
04	Meningkatnya kualitas layanan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	70	56,74	81,06	70,5			71			71,5			72			72		

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 :

	Sasaran 1 <i>Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan</i>
---	---

Untuk meningkatkan layanan perpustakaan agar terciptanya kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan dan meningkatnya minat baca masyarakat maka perpustakaan umum daerah perlu memiliki gedung dan bangunan yang mewah dan megah dengan sejumlah ruangan yang memadai, SDM yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, sumber informasi (koleksi) bahan pustaka yang lengkap, bervariasi, bermutu dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*up to date*) serta tersedia dan dilengkapi penerapan teknologi informasi.

Dalam rangka mencapai indikator-indikator di atas agar terwujudnya sasaran strategis Meningkatkan Layanan Perpustakaan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman melakukan upaya dengan pelaksanaan program Pembinaan Perpustakaan.

Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan (Renstra 2021 s.d 2026)	
--	---

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan perpustakaan merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan perpustakaan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Menurut Kepmen PAN No. 25 Tahun 2004 tentang indeks kepuasan masyarakat, ada 14 (empat belas) hal yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan, antara lain prosedur pelayanan, kesesuaian persyaratan, keberadaan/kejelasan petugas, kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan pelayanan, kesopanan petugas, kewajaran biaya, kepastian biaya, kepastian jadwal, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan.

Jadi dengan adanya indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat mengukur

kinerja layanan perpustakaan setiap tahunnya. Untuk itu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan menjadi sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Padang Pariaman.

Indeks kepuasan masyarakat layanan kepustakaan pada tahun 2025 realisasinya sebesar 97,5% dengan persentase capaian 97,5% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Terjadi sedikit penurunan capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Adanya berbagai faktor yang menyebabkan penurunan kinerja pada indikator ini adalah pengurangan anggaran urusan perpustakaan dan keterbatasan SDM untuk melakukan pelayanan perpustakaan kepada pengunjung perpustakaan.

Walaupun indikator ini tidak memenuhi target yang ditetapkan namun capaian 97,5% dikategorikan dengan interpretasi Berhasil. Karena capaian kinerja sudah berada di angka 97,5%. Meski adanya pengurangan anggaran urusan perpustakaan pada tahun 2025 namun komitmen kerja dari pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan khususnya bidang perpustakaan dalam hal meningkatkan kepuasan layanan Kepustakaan tetap tinggi sehingga interpretasi Berhasil dapat dicapai pada tahun 2025.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh program Pembinaan Perpustakaan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka, Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial serta Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestrasikan dan didayagunakan dimana secara umum output dari masing-masing sub kegiatan tersebut adalah untuk melengkapi sarana dan prasarana layanan perpustakaan yang ada di Perpustakaan Umum Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kepustakaan di lingkungan Kab. Padang Pariaman.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan	Persentase	100	97,5	97,5	Berhasil	

Pada tabel di atas, dapat tergambarkan realisasi capaian kinerja indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan sebesar 97,5% dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 100%. Capaian interpretasinya berada pada kategori Berhasil. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan di ukur melalui aplikasi layanan perpustakaan digital (inslislite), dengan responden pengunjung perpustakaan daerah selama tahun 2025.

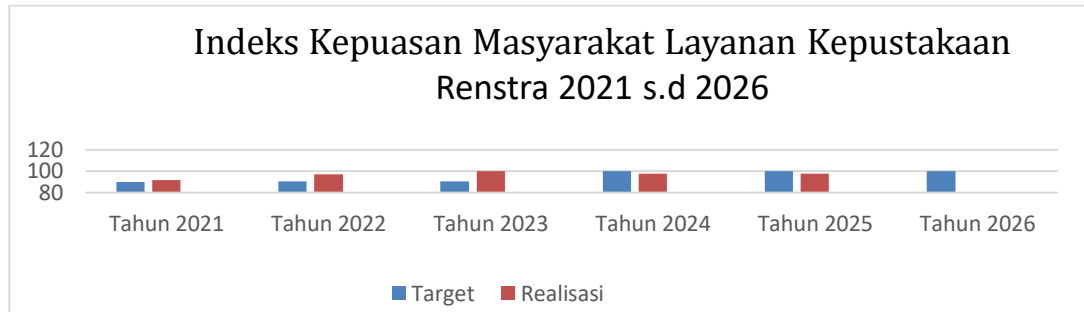
2. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025		%	Interpretasi	Ket
					Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan	Persentase	97,8	100	97,5	97,5	Berhasil	

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan mengalami sedikit penurunan dari tahun 2024. Realisasi tahun 2024 sebesar 97,8%, turun pada tahun 2025 menjadi 97,5% (0,3). Namun capaian kategorinya masih dalam interpretasi Berhasil. Penurunan realisasi kinerja dipengaruhi berbagai faktor antara lain; keterbatasan anggaran untuk pelayanan perpustakaan, kekurangan SDM layanan perpustakaan dan masih terbatasnya sarana prasarana layanan

perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung atau pemustaka yang datang ke Perpustakaan.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi:



Jika dilihat dari Rencana Strategis 5 tahunan, Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan realisasinya bersifat fluktuatif atau naik turun. Pada tahun 2021 sampai tahun 2023 indikator ini selalu mengalami kenaikan, namun di tahun 2024 dan 2025 indikator kinerja ini mengalami penurunan.

4. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan serta alternative solusi ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

4.1 Analisa Penyebab Kegagalan Pencapaian Target

Penyebab gagalnya tercapai target pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain :

1. Faktor kualitas layanan;
 - Pelayanan petugas kurang responsif,
 - Kurangnya kompetensi SDM
 - Jam layanan tidak sesuai kebutuhan pengguna
2. Faktor koleksi dan akses informasi;
 - Koleksi tidak relevan/ tidak update
 - Jumlah koleksi terbatas
 - Akses digital lema
3. Sarana Prasarana;
 - Fasilitas kurang memadai
 - Peralatan teknologi terbatas (komputer, wifi atau sistem bermasalah).

5. Beberapa Upaya Perbaikan Pencapaian Target Kinerja

Berikut beberapa upaya perbaikan yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM;
2. Pengembangan koleksi yang relevan;
3. Digitalisasi dan kemudahan akses;
4. Perbaikan sarana dan prasarana;
5. Inovasi layanan.

6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan	100%	96,29%	3,71%

Dari Tabel diatas Tingkat efisiensi sebesar 3,71%, Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan dapat interpestasikan sudah efisien.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan adalah sebesar Rp157.906.680. dengan persentase 96,29%. Dalam mencapai target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan tahun 2025 adanya dukungan anggaran sebesar Rp.163.982.745,- dengan 2 program 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan.

6. Berikut capaian program/ kegiatan Sasaran 4 dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan adalah sebagai berikut:

No	Program /Kegiatan	Capaian Program/Kegiatan	Satuan	Realisasi	Capaian
----	-------------------	--------------------------	--------	-----------	---------

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan			
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Output : Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000	20 Layanan	43 Layanan	215
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Output : Jumlah perpustakaan daerah yang melaksanakan pengembangan dan layanan operasional perpustakaan dan perpustakaan keliling	1 Pustaka Daerah	1 Pustaka Daerah	100
3	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Output : Jumlah Koleksi yang terpelihara	800 Eks	500 Eks	62,5
4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Output : Jumlah SDM Pemustaka yang diberikan pelatihan dan keterampilan inklusi sosial	5 Perpustakaan	33 Perpustakaan	660
5	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Output : Jumlah Naskah Kuno yang Terkumpul, Diolah dan Dialihmediakan	10 Eksemplar	10 Eksemplar	100

7. Dokumentasi Kegiatan



Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (Renstra 2021 s.d 2026 dan 2025 s.d 2029)



Membaca pada dasarnya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Membaca sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dari kehidupan sehari-hari. Kegiatan membaca harus ditumbuhkembangkan sejak usia dini dalam lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2007 tentang perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Dalam konteks ini, peningkatan minat baca masyarakat berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertujuan untuk melihat sejauh mana minat, kebiasaan, dan akses masyarakat terhadap aktivitas membaca. TGM ini digunakan oleh Perpustakaan untuk menggambarkan kondisi kegemaran membaca masyarakat pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota. Komponen pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca terdiri dari dimensi pra membaca, saat membaca dan pasca membaca dengan masing-masing bobot untuk Pra membaca 15%, Saat membaca 50% dan Pasca membaca 35%.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Targ et	Realis asi	%	Interpretasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	70	56,74	81,06	Cukup Berhasil	

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat tahun 2025 sebesar 56,74 dengan persentase capaian 81,06%, dengan kategori interpretasi Cukup

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Berhasil. Tahun 2025 indikator ini belum berhasil mencapai target yang telah disusun dan ditetapkan pada Renstra Periode 2021 s.d dan 2025 s.d 2029.

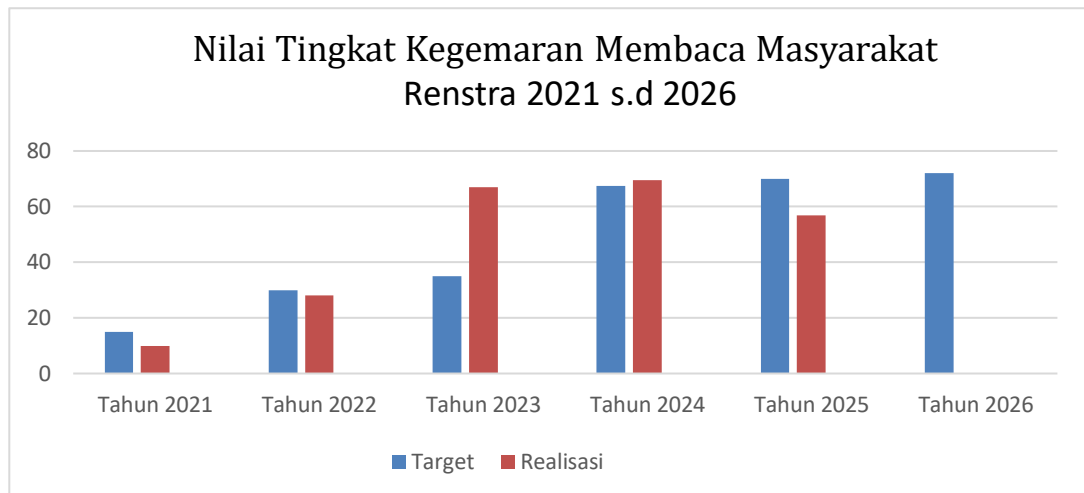
2. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025		%	Interpretasi	Ket
					Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	69,59	70	56,74	81,06	Cukup Berhasil	

Realisasi kinerja indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca pada tahun 2024 sebesar 69,59, Pada tahun 2025 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan sebesar 12,84 (56,74). Persentase capaian berada di angka 81,06 dengan interpetasinya berada pada kategori Cukup Berhasil. Penurunan nilai Tingkat Kegemaran Membaca ini dipengaruhi oleh perubahan instrumen penilaian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dimana pada tahun 2025 ini Komponen pengukuran menggunakan 3 dimensi yakni : Dimensi Pra Membaca, Dimensi Saat Membaca dan Pasca Membaca.

Perubahan instrumen penilaian ini menyebabkan hampir semua Kabupaten/ Kota mengalami penurunan nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat karena harus kembali menyesuaikan kembali dengan metode penilaian yang baru.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi:



Pada grafik di atas terdapat 2 tabel gambaran grafik untuk Indikator Kinerja Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Renstra Periode 2021 s.d 2026 dan Renstra Periode 2025 s.d 2029. Indikator ini kembali dilanjutkan untuk mengukur kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada Renstra Periode 2025 s.d 2029. Pada grafik Renstra 2021 s.d 2026 realisasi capaian Indikator Kinerja Nilai Tingkat Kegemaran Membaca selalu mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai 2024, namun pada tahun 2025 indikator ini turun dan tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Penurunan nilai ini disebabkan adanya perubahan instrumen penilaian yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sehingga banyak dari instrumen penilaian tersebut tidak dapat terpenuhi oleh Kabupaten/ Kota.

4. Membandingkan realisasi kinerja nilai TKM Kabupaten dan Provinsi Tahun 2025.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Realisasi Kabupaten Tahun 2025
1	2	3	4	9	10
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	59,42	56,74

Pada tabel diatas dapat tergambarkan nilai Tingkat Kegemaran Membaca untuk Tingkat Provinsi dan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebesar 56,74 berada sedikit di bawah nilai Provinsi Sumatera Barat yakni 59,42. Nilai Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman ini berada dalam kategori Rendah.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan serta alternative solusi ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

5.1 Analisa Penyebab Kegagalan Pencapaian Target

Penyebab kegagalan pencapaian target pada indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca dipengaruhi oleh adanya perubahan metode penilaian untuk tahun 2025. Metode penilaian tahun 2025 berfokus pada kualitas proses membaca (pra, saat, pasca) dan refleksi informasi bukan sekedar nurasi. Penilaian pada tahun 2025 ini menggunakan survei nasional yang mulai dibuka bulan oktober 2025 untuk warga usia 15 tahun ke atas. Untuk kedepannya akan disiapkan lebih matang lagi indikator-indikator pemenuhan kebutuhan atas penilaian ini dan dipelajari lagi kisi-kisi penilaian sehingga nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat yang menjadi Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2021 s.d 2026 dan 2025 s.d 2029 menjadi lebih baik lagi.

6. Upaya Peningkatan Pencapaian Target Kinerja

Berikut beberapa upaya dalam meningkatkan pencapaian target kinerja :

- Mempelajari lagi kisi-kisi penilaian Tingkat Kegemaran Membaca;

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- Meningkatkan minat baca masyarakat dengan mengadakan berbagai kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca di Kabupaten Padang Pariaman;
- Meningkatkan promosi, sosialisasi dan perpustakaan digital untuk memudahkan masyarakat mengakses bahan bacaan.

7. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	81,06%	97,22%	(-16,16)%

Dari Tabel diatas Tingkat efisiensi sebesar -16,16%, Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, untuk indikator kinerja Nilai Tingkat Kegemaran Membaca dapat interpestasikan belum efisien.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung Nilai Tingkat Kegemaran Membaca adalah sebesar Rp257.040.380. dengan persentase 97,22%. Dalam mencapai target indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca tahun 2025 adanya dukungan anggaran sebesar Rp.264.375.245,- dengan 2 program 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan.

8. Berikut capaian program/ kegiatan indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca adalah sebagai berikut:

No	Program /Kegiatan	Capaian Program/Kegiatan	Satuan	Realisasi	Capaian
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Output : Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang	20 Layanan	43 Layanan	215

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

		dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000			
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Output : Jumlah perpustakaan daerah yang melaksanakan pengembangan dan layanan operasional perpustakaan dan perpustakaan keliling	1 Pustaka Daerah	1 Pustaka Daerah	100
3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Output : Jumlah perpustakaan nagari/sekolah yang dibina, dievaluasi dan dinilai	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	100
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Output : Jumlah Koleksi yang terpelihara	800 Eks	500 Eks	62,5
6	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Output : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 Lokus	1 Lokus	100
7	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang	18 Orang	150
8	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Output : Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	33 Perpustakaan	660
10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan	Output : Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga	1 Dokumen	1 Dokumen	100

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat			
1	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Output : Jumlah peserta sosialisasi tata cara penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	10 Eks	10 Eks	100

5. Dokumentasi Kegiatan



**Sasaran 2:***Meningkatnya pengelolaan kearsipan sesuai standar kearsipan*

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan kearsipan sesuai standar kearsipan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman khususnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Arsip

a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota

- ✓ Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis;
- ✓ Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota

b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota

- ✓ Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis

c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota

- ✓ Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN

2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

a. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahun

- ✓ Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahun

b. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota

- ✓ Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana

3. Program Perizinan Penggunaan Arsip

a. Pelayanan izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota

- ✓ Penyediaan Daftar dan Penetapan izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Renstra 2021 .sd 2026

No	Indikator Kinerja	Capaian 2025		
		Target	Realisasi	%
1	Indeks Kearsipan (ANRI)	75	66,06	88,08

Indeks Kearsipan (ANRI) (Renstra 2021 s.d 2026)



Nilai indeks pengelola arsip eksternal (LAKE) merupakan program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola kearsipan secara nasional. Kegiatan ini mulai dilaksanakan oleh pemerintah pusat pada tahun 2017 sampai pada saat sekarang ini. ANRI melakukan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) berdasarkan LAKE dan LAKI paling lambat pada 30 november setiap tahun anggaran.

Adapun bentuk instrument audit kearsipan antara lain ; formulir audit kearsipan, wawancara dan verifikasi lapangan. Tim pengawas kearsipan memberikan nilai atas hasil pengawasan kearsipan yang dituangkan dalam LAKE dan LAKI dengan predikat nilai buruk, kurang, cukup, baik, sangat baik. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Sumbar melakukan penilaian kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/ Kota di lingkungan Prov. Sumbar. LKD Prov. Sumbar akan langsung di nilai oleh Arsip Nasional Republik Indonesia setiap tahunnya.

Nilai LAKE ini merupakan salah satu indikator Reformasi Birokrasi dari Kemenpan-RB Republik Indonesia. Agar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan penghargaan Reformasi Birokrasi tentunya nilai LAKE Kabupaten Padang Pariaman harus mendapatkan predikat sangat baik dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar Kearsipan	Indeks Kearsipan (ANRI)	Nilai	75	66,06	88,08	Cukup Berhasil	

Nilai Indeks Audit Kearsipan Eksternal Tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mendapatkan predikat B yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), untuk realisasi nilainya sebesar 66,06 dengan persentase capaian 88,08 tingkat interpretasi Cukup Berhasil. Realisasi nilai ini dikeluarkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Sumbar.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025		%	Interpretasi	Ket
					Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar Kearsipan	Indeks Kearsipan (ANRI)	Nilai	70,11	75	66,06	88,08	Cukup Berhasil	

Realisasi nilai LAKE Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 sebesar 66,06 turun jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 yakni 70,11. Namun untuk predikat yang didapatkan masih sama dengan tahun 2024 yakni dengan Predikat B (Baik).

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis:



Perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai tahun 2025 realisasinya bersifat fluktuatif atau naik turun. Tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan dan naik pada tahun 2023 sampai 2024 dan kembali turun lagi di tahun 2025.

4. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan serta alternative solusi ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

4.1 Analisa Penyebab Kegagalan Pencapaian Target

Penyebab kegagalan pencapaian target pada indikator Indeks Kearsipan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain :

1. Keterbatasan anggaran urusan kearsipan;
2. Keterbatasan Tenaga Fungsional Kearsipan;
3. Masih kurangnya sarana prasarana kearsipan.

5. Upaya Peningkatan Pencapaian Target Kinerja

Berikut beberapa upaya dalam meningkatkan pencapaian target kinerja :

1. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pengelola kearsipan di OPD maupun Nagari dan Kecamatan;
2. Melakukan rapat-rapat evaluasi internal dengan pimpinan maupun antar lintase sektor OPD untuk dapat menunjang program dan kegiatan kearsipan;
- Melakukan pembinaan-pembinaan tata kelola kearsipan ke OPD dan Nagari.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar Kearsipan	Indeks Kearsipan (ANRI)	88,08%	92,51%	(-4,43)%

Dari Tabel diatas Tingkat efisiensi sebesar -4,43%, Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, untuk indikator kinerja Indeks Kearsipan (ANRI) dapat interpestasikan belum efisien.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung Indeks Kearsipan (ANRI) adalah sebesar Rp40.988.650. dengan persentase 92,51%. Dalam mencapai target indikator Indeks Kearsipan (ANRI) tahun 2025 adanya dukungan anggaran sebesar Rp.44.302.750,- dengan 3 program 5 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

2. Capaian program/ kegiatan sasaran 2 dengan indikator Nilai Indeks Pengelola Arsip Eksternal (LAKE) adalah sebagai berikut:

No	Program / Sub Kegiatan	Capaian Program/Kegiatan	Satuan	Realisasi	Capaian
	Program Pengelolaan Arsip	Outcome : Nilai Indeks Kearsipan Eksternal (LAKE)			
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Output : Jumlah Naskah Yang Digunakan dan Diciptakan	60.786 Berkas	92.861 Berkas	152,76
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Output : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip	25 Laporan	25 Laporan	100
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	Output : Jumlah Arsip Statis yang	100	250	250

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	Arsip Statis	Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	Arsip	
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Outcome : Nilai Indeks Kearsipan Eksternal (LAKE)			
	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemsunahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh)	Output : Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahun	20 Arsip	0 Arsip	0
	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Output : Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi,	25 Arsip	142 Arsip	568
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Outcome : Nilai Indeks Kearsipan Eksternal (LAKE)			
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Output : Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Daftar	0 Daftar	0

6. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



REKAPITULASI NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL					
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN					
TAHUN 2025					
NO	ASPEK	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT	NILAI ASPEK
I.	ASPEK KEBIJAKAN	1100	680	15%	9,27
II.	ASPEK PEMBINAAN	1800	1250	25%	16,45
III.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 TAHUN	800	610	10%	7,63
IV.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS	2200	1370	30%	18,68
V.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	2400	1680	20%	14,03
TOTAL NILAI STANDAR/NILAI/NILAI AKHIR		8400	5590	100%	66,06
		B (BAIK)			



Sasaran 3:

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Ukuran keberhasilan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja ditetapkan dengan indikator kinerja berupa:

Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan & Perpustakaan dari Inspektorat/ Nilai AKIP Perangkat Daerah (Renstra 2021 s.d 2026 dan 2025 s.d 2029)



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansi nya sesuai yang diamanatkan dalam RPJMD.

Setiap tahunnya Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang mana juga diberikan penilaian dan peringkat atas Implementasi SAKIP yang diterapkan di masing-masing Perangkat Daerah.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat (Nilai AKIP Perangkat Daerah)	Nilai	78 (BB)	79,20 (BB)	101,54	Sangat Berhasil	

Dari tabel diatas dapat dilihat Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat pada tahun 2025 realisasinya

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

mencapai 79,20 (BB) berada di atas target yang ditetapkan dengan persentase capaian 101,54% interpretasi dengan kategori Sangat Berhasil.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025		%	Interpretasi	Ket
					Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat (Nilai AKIP Perangkat Daerah)	Nilai	75,50 BB	78 (BB)	79,20 (BB)	101,54	Sangat Berhasil	

Pada tahun 2025 Indikator kinerja Hasil Penilaian SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat (Nilai AKIP Perangkat Daerah) mengalami kenaikan dari tahun 2024. Realisasi tahun 2025 sebesar 79,20 sedangkan tahun 2024 realisasinya sebesar 75,50. Hal ini membuktikan adanya peningkatan kinerja pengelolaan SAKIP di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan secara baik dan tersistematis.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi:



Pada grafik di atas menggambarkan realisasi untuk perbandingan Renstra periode 2021 s.d 2026 dengan Renstra 2025 s.d 2030. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Nilai AKIP Perangkat Daerah) selama 5 tahun realisasinya mengalami fluktuatif atau naik turun.

Pada tahun 2021 sampai tahun 2024 indikator ini selalu mengalami penurunan kinerja. Namun di tahun 2025 Indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Nilai AKIP Perangkat Daerah) mengalami kenaikan. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kinerja dari indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP (Nilai AKIP Perangkat Daerah) untuk Renstra tahun 2021 s.d 2026 dan Nilai AKIP Perangkat Daerah periode 2025 s.d 2029.

4. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan serta alternative solusi ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

4.1 Analisa Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Penyebab keberhasilan pencapaian target pada indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Nilai AKIP Perangkat Daerah) dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain :

1. Perencanaan Kinerja yang berkualitas
2. Pengukuran kinerja yang akurat
3. Pengelolaan Anggaran berbasis kinerja
4. Monitoring dan evaluasi monev yang konsisten
5. Komitmen penuh dari pimpinan Perangkat Daerah
6. Peningkatan kapasitas SDM
7. Pemanfaatan teknologi pengukuran kinerja
8. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi internal

5. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat	101,54%	95,61%	5,93%

Dari Tabel diatas Tingkat efisiensi sebesar 5,93%, Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, untuk indikator kinerja Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat dapat interpestasikan tidak efisien.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat adalah sebesar Rp3.011.407.593. dengan persentase 95,61%. Dalam mencapai target indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Inspektorat tahun 2025 adanya dukungan anggaran sebesar Rp.3.149.613.408,- dengan 1 program 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan.



Sasaran 1:

Meningkatnya Layanan Kearsipan (Renstra 2025 s.d 2029)

Kualitas layanan kearsipan merupakan Sasaran Strategis pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada Renstra Periode 2025 s.d 2029. Indikator ini bertujuan untuk memujudkan layanan kearsipan yang tertib, cepat, akurat, transparan dan berbasis teknologi sehingga mampu memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung tata kelola pemerintahan yang selektif dan akuntabel.

Ukuran keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kearsipan ditetapkan dengan indikator kinerja berupa:

Persentase Dokumen Arsip dalam bentuk Digital (Renstra 2025 s.d 2029)



Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital merupakan indikator kinerja yang mesti dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi kearsipan untuk meningkatkan tata kelolanya menjadi lebih baik dan lebih kompleks lagi dalam pengembangan tata kelola arsip.

Jika dokumen arsip dapat dilaksanakan secara digital maka arsip – arsip yang ada dapat tersimpan dengan baik serta dapat di akses secara cepat, tepat dan efisien. Untuk itu indikator ini menjadi kunci utama bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk mengukur sejauh mana kualitas pengelolaan arsip di Kabupaten Padang Pariaman.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Layanan	Persentase dokumen arsip	Persentase	20	20	100	Berhasil	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	Kearsipan	dalam bentuk digital						
--	-----------	----------------------	--	--	--	--	--	--

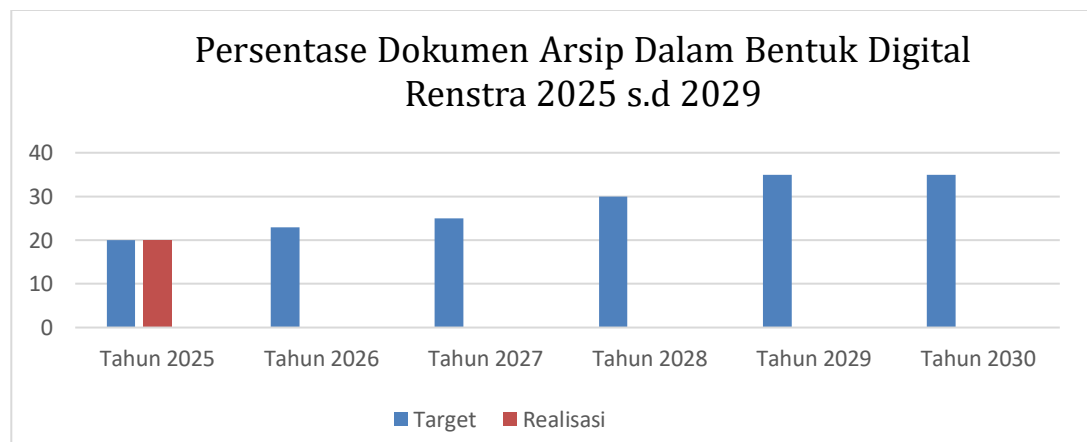
Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital pada tahun 2025 berhasil mencapai target dengan realisasi capaian 20% dengan interpretasi Berhasil. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 20% dengan asumsi dokumen arsip telah dapat dilakukan digitalisasi 100% pada tahun 2025.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025		%	Interpretasi	Ket
					Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Layanan Kearsipan	Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital	Persentase	-	20	20	100	Berhasil	

Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital tidak dapat dilakukan perbandingan kinerja dengan tahun 2024 karena indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2025 pada Renstra 2025 s.d 2029. Untuk itu perbandingan pada tahun sebelumnya tidak bisa dilakukannya, baru bisa dilakukan perbandingan pada tahun 2026.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis:



Pada tahun pertama indikator Persentase Dokumen Arsip dalam bentuk digital berhasil mencapai target yang ditetapkan. Diharapkan indikator ini juga mampu mencapai target-target keberhasilan pada tahun berikutnya hingga akhir RPMJD yakni 2030.

4. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan serta alternative solusi ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

4.1 Analisa Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target

Penyebab berhasilnya pencapaian target pada indikator Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain :

- Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan;
- Perencanaan Program kearsipan yang matang;
- Ketersediaan SDM Kearsipan yang berkompeten;
- Dukungan Sarana dan Prasarana
- Pemanfaatan teknologi informasi kearsipan (srikandi dan SIKN JIKN)
- SOP yang jelas
- Monitoring dan evaluasi berkala

5. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Layanan Kearsipan	Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital	100%	98,38%	1,62 %

Dari Tabel diatas Tingkat efisiensi sebesar 1,62 %-, Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital adalah sebesar Rp11.441.500. dengan persentase

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

98,38%. Dalam mencapai target indikator Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital tahun 2025 adanya dukungan anggaran sebesar Rp.11.630.000,- dengan 1 program 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

6. Capaian program/ kegiatan indikator Persentase Dokumen Arsip Dalam Bentuk Digital adalah sebagai berikut:

No	Program / Sub Kegiatan	Capaian Program/Kegiatan	Satuan	Realisasi	Capaian
	Program Pengelolaan Arsip	Outcome : Nilai Indeks Kearsipan Eksternal (LAKE)			
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Output : Jumlah Naskah Yang Digunakan dan Diciptakan	60.786 Berkas	92.861 Berkas	152,76
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Output : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	43 Pengguna	70 Pengguna	162,79

7. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan



**Sasaran 2:***Meningkatnya Kualitas SDM (Renstra 2025 s.d 2029)*

Meningkatnya Kualitas SDM merupakan Sasaran Strategis ke 2 dari Indikaotr Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan periode Renstra 2025 s.d 2029. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manuasi yakni SDM Arsiparis dan Pustakawan yang menjadi ujung tombak pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan urusan Kearsipan dan Perpustakaan.

Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak, pemikir dan perencana dalam suatu organisasi. SDM Kearsipan dan Perpustakaan yang berkualitas dapat meningkatkan kinerja layanan Kearsipan dan Perpustakaan di Kabupaten Padang Pariaman. Meningkatnya kualitas SDM di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga dapat mendorong keberhasilan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manuasia yang Cerdas dan terampil serta mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan dan demokratis.

Ukuran keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas SDM ditetapkan dengan indikator kinerja berupa:

Persentase Pustawakan dan Arsiparis yang Bersertifikat (Renstra



2025 s.d 2029)

Persentase Pustakawan dan Arsiparis yang bersertifikat adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak pustakawan dan arsiparis di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman yang telah memiliki sertifikat kompetensi, dibandingkan dengan total atau jumlah pustakawan dan arsiparis yang ada.

Tujuan dari indikator ini adalah untuk mengukur tingkat profesionalisme tenaga kearsipan dan perpustakaan, menilai kualitas SDM di suatu instansi atau lembaga dan menjadi dasar dalam perencanaan peningkatan kompetensi. Persentase Pustakawan dan Arsiparis yang terampil dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama dengan Sasaran Meningkatnya kualitas SDM bertujuan untuk untuk mendorong kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 s.d 2029.

Indikator ini diharapkan dapat mengukur kinerja SDM Kearsipan dan Perpustakaan di Kabupaten Padang Pariaman dan nantinya akan ditingkatkan kemampuan SDM dengan berbagai pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Dengan tercapainya target-target untuk indikator ini maka akan mempengaruhi Kualitas SDM di Kabupaten Padang Pariaman dan kinerja pelayanan publik khususnya untuk Layanan Kearsipan dan Layanan Perpustakaan.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kualitas SDM	Persentase Pustakawan dan Arsiparis yang Bersertifikat	Persentase	15	15	100	Berhasil	

Indikator Persentase Pustakawan dan Arsiparis yang Bersertifikat merupakan indikator Renstra Periode 2025 s.d 2029. Pada tahun 2025 indikator ini berhasil mencapai target sebesar 15% dengan persentase capaian 100% interpretasi Berhasil.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025		%	Interpretasi	Ket
					Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Kualitas SDM	Persentase Pustakawan dan Arsiparis yang Bersertifikat	Persentase	-	15	15	100	Berhasil	

Persentase Pustakawan dan Arsiparis yang Bersertifikat pada tahun 2025 realisasi nya 15% sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk 2024 indikator ini tidak dapat di ukur karena ini menjadi indikator Renstra Periode 2025 s.d 2029 RPJMD. Oleh sebab itu indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis:



Pada tahun pertama indikator Pustakawan dan Arsiparis yang bersertifikat berhasil mencapai target yang ditetapkan. Diharapkan nantinya indikator ini pada tahun 2026 sampai 2030 dapat mengalami kenaikan dan mencapai target yang ditetapkan hingga akhir RPMJD yakni 2030.

4. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan serta alternative solusi ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

4.1 Analisa Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Penyebab gagalnya pencapaian target pada indikator Persentase Pustakawan dan Arsiparis yang bersertifikat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain :

- Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan Perangkat Daerah
- Adanya berbagai bimtek, sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga fungsional arsiparis dan pustakawan
- Adanya semangat dan komitmen yang tinggi dari arsiparis dan pustakawan untuk meningkatkan kompetensi dan jenjang karirnya.

5. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas SDM	Persentase Pustakawan dan Arsiparis yang Bersertifikat	100%	92,68%	7,32%

Dari Tabel diatas Tingkat efisiensi sebesar 7,32%, Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung Persentase Pustakawan dan Arsiparis yang Bersertifikat adalah sebesar Rp82.663.353,- dengan persentase 92,68%. Dalam mencapai target indikator Pustakawan dan Arsiparis yang Bersertifikat tahun 2025 adanya dukungan anggaran sebesar Rp.89.191.800,- dengan 1 program 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

6. Capaian program/ kegiatan indikator Persentase Pustakawan dan Arsiparis yang Bersertifikat adalah sebagai berikut:

No	Program / Sub Kegiatan	Capaian Program/Kegiatan	Satuan	Realisasi	Capaian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	Outcome : Pustakawan dan Arsiparis yang Bersertifikat			

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	Kota				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100

A. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Pendanaan merupakan faktor penting dalam rangka pencapaian kinerja suatu organisasi. Pada tahun 2025 total pagu belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman diluar gaji dan tunjangan adalah sebesar Rp694.029.735.

Berikut realisasi belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	373.721.740	348.103.827	25.617.913	93,14
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.346.100	22.064.000	282.100	98,74
a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.346.100	12.179.000	167.000	98,65
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.100	9.885.000	115.100	98,85
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89.360.000	79.186.000	10.174.000	88,61
a	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.360.000	74.380.000	9.980.000	88,17
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	5.000.000	4.806.000	194.000	96,12

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	Keuangan Akhir Tahun SKPD				
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.191.800	82.663.353	6.528.447	92,68
a	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.191.800	82.663.353	6.528.447	92,68
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.823.840	164.190.474	8.633.366	95
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	45.151.114	2.848.886	94,06
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.823.840	119.039.360	5.784.480	95,37
II	Program Pengelolaan Arsip	44.278.850	42.711.250	1.567.600	96,46
1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	19.473.850	18.185.950	1.287.900	93,39
a	Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	11.647.300	11.430.000	217.300	98,13
b	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	7.826.550	6.755.950	1.070.600	86,32
2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	13.175.000	13.083.800	91.200	99,31
a	Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	13.175.000	13.083.800	91.200	99,31
3	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	11.630.000	11.441.500	188.500	98,38
a	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN	11.630.000	11.441.500	188.500	98,38
III	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	7.683.000	5.772.500	1.910.500	75,13
1	Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah	4.898.000	2.987.500	1.910.500	60,99

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun				
a	Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Rentensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	4.898.000	2.987.500	1.910.500	60,99
2	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	2.785.000	2.785.000	0	100
a	Sub Kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	2.785.000	2.785.000	0	100
IV	Program Perizinan Penggunaan Arsip	3.970.900	3.946.400	24.500	99,38
1	Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	3.970.900	3.946.400	24.500	99,38
a	Sub Kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	3.970.900	3.946.400	24.500	99,38
V	Program Pembinaan Perpustakaan	252.982.745	247.725.380	5.257.365	97,92
1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190.145.245	187.045.080	3.100.165	98,37
a	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	11.297.500	9.769.000	1.528.500	86,47
b	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.995.245	113.759.280	1.235.965	98,93
c	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	18.752.500	18.524.600	227.900	98,78

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

d	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	15.000.000	14.963.000	37.000	99,75
e	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	30.100.000	30.029.200	70.800	99,76
2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62.837.500	60.680.300	2.157.200	96,57
a	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	12.925.000	12.300.900	624.100	95,17
b	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	38.615.000	38.279.000	336.000	99,13
c	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	11.297.500	10.100.400	1.197.100	89,40
V	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	11.392.500	9.315.000	2.077.500	81,76
1	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	11.392.500	9.315.000	2.077.500	81,76
a	Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan, dan Pengalihmediaan Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	11.392.500	9.315.000	2.077.500	81,76
	JUMLAH	694.029.735	657.574.357	36.455.378	94,74

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan sistem akuntabilitas kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah instrument yang digunakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Pengukuran kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025 ini disusun berdasarkan misi ke 4 dan ke 5 pada Renstra periode 2021 s.d 2026 dan misi ke 1 dan ke 2 pada Renstra periode 2025 s.d 2029. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah mengacu kepada tujuan dan sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sehingga capaian kinerja setiap tahunnya dapat menggambarkan capaian pada rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Berikut beberapa keberhasilan yang telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun 2025:

1. Nilai LAKE tahun 2025 yang dikeluarkan oleh ANRI memperoleh predikat B dengan nilai 66,06;
2. Terlaksananya penerapan aplikasi persuratan SRIKANDI;
3. Terselenggaranya lomba-lomba kegemaran membaca tingkat SD/MI dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat tingkat Kab. Padang Pariaman;
4. Terlaksananya layanan Perpustakaan Daerah berbasis digital dan layanan mobil perpustakaan keliling ke pustaka sekolah/Nagari/TBM maupun di lingkungan Pemerintah Kab. Padang Pariaman;

5. Terlaksananya layanan antar jemput pemustaka ke Perpustakaan Umum Daerah bagi Siswa SD/SMP dan SMA di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman;
6. Terlaksananya instalasi aplikasi Inslislite kepada perpustakaan Nagari dan Sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengunjung perpustakaan;
7. Terlaksananya pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan atau perpustakaan berbasis inklusi sosial;
8. Nilai IPLM Kabupaten Padang Pariaman 7,79;
9. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca 56,74.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terhadap akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan;
2. Terlaksananya berbagai program dan kegiatan sesuai dengan output maupun outcome yang ditargetkan;
3. Adanya koordinasi dan konsultasi yang baik antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab/Kota di Sumatera Barat serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya jumlah pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan jika dibandingkan dengan ANJAB dan ABK;
2. Kemampuan SDM Perpustakaan dan Kearsipan yang masih terbatas dalam bidang teknologi informasi;
3. Terbatasnya anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyebabkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan urusan kearsipan dan perpustakaan belum dapat dilaksanakan secara maksimal;
4. Pemanfaatan teknologi yang belum maksimal;
5. Masih rendahnya minat dan budaya membaca masyarakat;
6. Luasnya wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang menyebabkan pemerataan layanan perpustakaan sulit dilakukan.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan antara lain:

1. Melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manuasi (SDM) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
2. Melakukan penguatan Sistem Manajemen dan tata kelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
3. Meningkatkan Digitalisasi Layanan Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Menambah sarana dan prasarana layanan perpustakaan dan kearsipan;
5. Meningkatkan kegiatan promosi dan advokasi Perpustakaan kepada masyarakat dan stakeholder terkait;
6. Melakukan penguatan kerjasama dengan lintas OPD untuk peningkatan Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
7. Meningkatkan pelayanan kearsipan dan perpustakaan melalui implementasi program-program dan kegiatan unggulan yang terkait langsung dengan indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama tahun 2025.

Pariaman, 30 Januari 2026
**Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Padang Pariaman**



Dra.SUMARNI,M.Pd

NIP. 19681023 199303 2 002

LAMPIRAN

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAN

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 – 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(SUNARIYATI, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	